

Implementasi Kebijakan Program Stunting Pada Puskesmas Lawir Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur

Saltisa Beti Susanti ¹⁾, Sapto Pramono ²⁾, Ika Devy Pramudiana ³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: saltisabs@gmail.com

ABSTRAK

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kejadian stunting bisa terjadi dimulai dari saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan, 2016). Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan kendala stunting di Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur yaitu penyebabnya adalah karena ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi sehingga menyebabkan anak turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Grindle yang menggunakan dua indikator yaitu isi kebijakan dan konteks evaluasi serta menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini memberikan kesimpulan terkait dengan isi kebijakan dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Lamba Leda Timur belum berhasil secara optimal dikarenakan beberapa faktor, diantaranya banyak mengkonsumsi makanan instan hingga kurangnya pendidikan orang tua sehingga berdampak kepada anak. Mengenai proses implementasi kebijakan program stunting berdasarkan konteks evaluasi, maka dapat dikatakan tidak ada kendala di pembentukan pos gizi di setiap desa, pemberian makanan tambahan berupa telur, susu kacang-kacangan, serta pemberian biskuit balita dan ibu hamil. Saran bagi puskesmas yaitu agar lebih sering mengadakan sosialisasi terkait program stunting.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesehatan, Stunting, Puskesmas

Abstract

Health is a state of physical, mental and social well-being that enables every person to live a socially and economically productive life. Stunting events can occur starting from when the fetus is still in the womb and only become visible when the child is two years old (Ministry of Health, 2016). Based on initial observations made, researchers found that the problem of stunting at the Lawir Community Health Center, East Lamba Leda District was that the cause was because mothers did not have access to healthy and nutritious food, causing children to also lack nutrition. Apart from that, low intake of vitamins and minerals consumed by the mother can also influence the condition of fetal malnutrition. The theory used is implementation theory according to Grindle which uses two indicators, namely policy content and evaluation context and uses descriptive qualitative methods. This research provides conclusions related to the content of the policy, it can be said that in Lamba Leda Timur District it has not been optimally successful due to several factors, including consuming a lot of instant food and lack of parental education which has an impact on children. Regarding the process of implementing the stunting program policy based on the evaluation context, it can be said that there are no obstacles in establishing nutrition posts in each village, providing additional food in the form of eggs, nut milk, as well as giving biscuits to toddlers and pregnant women. The suggestion for community health centers is to hold more frequent outreach regarding the stunting program.

Keywords: Policy Implementation, Health, Stunting, Community Health Center

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Menurut Notoadmodjo (2012) kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut Neuman (1982), kesehatan merupakan suatu keseimbangan biopsiko, sosio, kultural, dan spiritual pada tiga garis pertahanan yang fleksibel.

Masalah Kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, di antaranya adalah pengetahuan dan sikap masyarakat dalam merespon suatu penyakit (Notoatmodjo, 2003). Pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu. Dimana tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah agar masyarakat, kelompok atau individu dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Kesehatan (Notoatmodjo, 2007). Pendidikan kesehatan merupakan salah satu tindakan keperawatan yang mempunyai peranan yang penting. Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan.

Angka prevalensi *stunting* di tingkat nasional berdasarkan Survei Status Gizi Balita mengalami penurunan sebesar 3.27%, yaitu dari 27.67% pada tahun 2019 menjadi 24,4% di tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan, namun *stunting* masih menjadi tantangan pemerintah karena target angka prevalensi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu sebesar 14% di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Presiden pada Rapat

Terbatas Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 11 Januari 2022 bahwa prevalensi stunting harus diturunkan sedikitnya 3% tahun 2022.

Atas arahan tersebut diatas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi pengampu dalam Perpres 72 tahun 2021 melakukan pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dimana Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi lokus prioritas Stunting. Penanganan di 12 provinsi dapat mencakup sekitar 60% sasaran tanpa mengesampingkan provinsi lain dan diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar dalam upaya percepatan penurunan stunting tanpa mengesampingkan provinsi lainnya. Percepatan penurunan angka stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Peran aktif Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam memastikan pelaksanaan intervensi spesifik dapat berjalan dengan baik di masing- masing daerahnya.

Kejadian stunting bisa terjadi dimulai dari saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan, 2016). Masalah gizi terutama masalah *stunting* mencerminkan adanya efek dari kekurangan gizi maupun penyakit infeksi sejak kelahiran atau bahkan sebelum kelahiran dan anak balita merupakan kelompok yang rentan mengalami masalah tersebut. Stunting ditunjukkan dengan nilai *z-score* tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 SD dari Median Standar Pertumbuhan Anak (World Health Organization, 2012).

Stunting berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu menyebabkan gangguan dalam perkembangan otak, kecerdasan serta terganggunya pertumbuhan fisik dan metabolisme tubuh. Dalam jangka panjang berkaitan dengan perkembangan otak dan kecerdasan yang mengalami gangguan di masa kecil dan masa remaja, dapat menyebabkan tertundanya penyelesaian pada masa sekolah,

menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas kerja yang tidak kompetitif yang dapat menyebabkan pada rendahnya pendapatan ekonomi.

Kejadian balita pendek atau *stunting* menjadi masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia yang dikumpulkan WHO tahun 2005-2017 yaitu 36,4%. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ketiga dengan prevalensi balita *stunting* tertinggi di Asia Tenggara. (Kemenkes RI, 2018). Penyelenggaraan intervensi penurunan *stunting* Ada tiga faktor utama penyebab stunting berdasarkan *Unicef Framework* yaitu asupan makanan tidak seimbang, berat badan lahir rendah (BBLR). dan riwayat penyakit. Kondisi gizi ibu sejak sebelum hamil dan setelah mengandung sangat mempengaruhi kondisi janin. Jika kondisi gizi ibu sebelum dan sesudah mengandung janin mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dan anemia, hal tersebut dapat menyebabkan ibu berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). BBLR dapat menjadi faktor yang berisiko tinggi penyebab stunting. Selain itu pola asuh ibu terutama dalam pemberian makanan yaitu pemberian ASI eksklusif serta pemberian makanan tambahan yang diperlukan ketika bayi berumur 6 bulan sangat mempengaruhi gizi mikro dan makro. Apabila bayi tidak cukup mendapatkan ASI dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) secara baik dapat menyebabkan resiko daya tahan tubuh anak rendah dan mengalami infeksi penyakit. Menurut *World health Organization* (2013), intervensi prenatal dan pascanatal adalah intervensi yang dapat digunakan dalam penanggulangan dan penurunan balita *stunting* (Action, 2010; Khoeroh, Handayani dan Indriyanti, 2017; Fitri, 2018).

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting, bahwa dalam rangka efektivitas dan sinkronisasi pengelolaan program penurunan stunting di Kabupaten Manggarai Timur perlu adanya koordinasi antar lintas sektor berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada masing masing

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah. Dengan adanya kebijakan program stunting di Kabupaten Manggarai, menurut kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan program tersebut belum berjalan secara efektif dalam menekan angka penurunan stunting.

Implementasi kebijakan program stunting di Kabupaten Manggarai Timur sepenuhnya belum berhasil secara maksimal dikarenakan beberapa faktor-faktor. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penyebab kendala stunting diantaranya ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi sehingga menyebabkan anak turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin. Serta peneliti melakukan wawancara umum kepada masyarakat dan Kepala Puskesmas Lawir, menyatakan bahwa faktor penyebab tersebut berasal dari rendahnya asupan nutrisi sewaktu masa hamil, tingginya angka ibu yang melahirkan di bawah usia 20 tahun, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan di atas usia 35 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program *Stunting* Pada Puskesmas Lawir Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009:18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental. Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik,

melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Riant Nugroho (2003:51) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan) maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

2. Tahapan Kebijakan Publik

a) *Agenda Setting* (Penyusunan Agenda)

Agenda setting atau penyusunan agenda adalah tahap-tahap kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang sangat baik untuk memaknai apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

b) *Policy Formulating* (Formulasi Kebijakan)

Tahapan kedua yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik adalah melakukan formulasi kebijakan. Pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah.

c) *Policy Adoption* (Pengadopsian Kebijakan)

Pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimitasi untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik.

d) *Policy Implementation* (Implementasi Kebijakan)

Implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas untuk mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat.

e) *Policy Evaluation* (Evaluasi Kebijakan)

Evaluasi kebijakan yang sudah diberlakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Melalui tahapan evaluasi inilah pemerintah dapat

melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu rangkaian atau proses dari kebijakan publik. Salah satu model implementasi kebijakan yang dapat dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni model yang kemukakan oleh Merille S. Grindle. Grindle dalam Wahab menjelaskan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijaksanaan. Di samping itu, menurut Nugroho, ide dasar implementasi kebijakan menurut Grindle yakni setelah kebijakan melalui proses transformasi, maka implementasi kebijakan dilakukan. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Grindle memperkenalkan model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam pemangku kepentingan, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh materi program ataupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konsteks administrasi. Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan kedalam suatu program atau proyek yang dirancang serta telah dibiayai. Implementasi dapat dikatakan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif karena menyangkut beberapa aspek dalam kebijakan yakni implementator, penerima implementasi, konflik yang mungkin terjadi diantara paraaktor implementasi dan sumber daya implementasi yang diperlukan.

Model implementasi dari Grindle juga bersifat menyeluruh, karena tidak hanya fokus pada aspek birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga fokus pada kelompok sasaran. Selain itu, menurut Grindle dalam teori implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dilihat dari prosesnya, dengan merujuk pada apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang ditentukan (design) berdasarkan pada aksi kebijakannya. Sementara dari tercapainya tujuan kebijakan dapat mengacu pada dua faktor yakni dampak kepada masyarakat dan tingkat perubahan yang terjadi pada penerima atau kelompok sasaran kebijakan.

4. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Merilee S. Grindle (1980:7) menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *content of policy* (isi kebijakan) dan *contex of implementation* (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- a) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*)
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*)
- c) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)
- d) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)
- e) Para pelaksana program (*program implementators*)
- f) Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*)

5. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984:310), untuk mengukur kinerja

implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

6. Stunting

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang dan tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting merupakan masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa mendatang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018).

Schmidt 2014 dalam Fikawati (2017) mengatakan bahwa stunting juga didefinisikan sebagai tinggi badan menurut usia di bawah -2 standar median kurva

pertumbuhan anak WHO (WHO, 2010). *Stunting* merupakan kondisi kronis buruknya pertumbuhan linear seorang anak yang merupakan akumulasi dampak berbagai faktor seperti buruknya gizi dan kesehatan sebelum dan setelah kelahiran anak tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Schmidt (2014) yang menyatakan bahwa stunting merupakan dampak dari kurang gizi yang terjadi dalam periode waktu yang lama yang pada akhirnya menyebabkan penghambatan pertumbuhan linear.

7. Penyebab Stunting

Menurut beberapa penelitian, kejadian *stunting* pada anak merupakan suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak dan sepanjang siklus kehidupan. Pada masa ini merupakan proses terjadinya *stunting* pada anak dan peluang peningkatan *stunting* terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami *intrauterine growth retardation* sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolisme serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya *stunting* (Allen and Gillespie, 2001). Gizi buruk kronis (*stunting*) tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya.

Terdapat tiga faktor utama penyebab stunting yaitu sebagai berikut:

- a) Asupan makanan tidak seimbang (berkaitan dengan kandungan zat gizi dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air).
- b) Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR).
- c) Riwayat penyakit.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut para ahli Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral. dalam (Hutami, 2017). Menurut Husaini dan Purnomo, (2009:130) pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan katakata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi. Oleh karena itu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu implementasi kebijakan program stunting pada Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. pada penelitian ini yang dapat dikaji oleh peneliti

yaitu fokus terhadap implementasi kebijakan program stunting pada Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Alasan memilih dilokasi yang diteliti adalah karena ada masalah yang bisa diangkat yaitu lahirnya anak dengan kekurangan gizi kronis atau stunting yaitu ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi serta terlalu banyak mengonsumsi makanan instan sehingga anak juga turut kekurangan gizi. Sebelumnya, peneliti juga telah melakukan wawancara umum dengan masyarakat dan kepala Puskesmas Lawir mereka mengatakan bahwa rendahnya asupan gizi ketika selama masa kehamilan, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat dengan jarak melahirkan, terlalu muda untuk melahirkan pada usia 20 tahun dan terlalu tua untuk melahirkan di atas usia 35 tahun.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam hal ini, terdapat beberapa konteks implementasi terhadap kebijakan program stunting pada Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya:

1. Kekuasaan

Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angelina Nurita warga Desa Tango

Molas, Ibu Klemensiana Luneng warga Desa Tango Molas, Ibu Teresia Retno Wati warga Desa Tango Molas. Wawancara juga dilakukan kepada pihak Puskesmas Lawir yaitu kepada Bapak Kepala Puskesmas Lawir yaitu Fabianus Yan Supandi. Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada ketua gizi Ibu Elsi Mina Mingsi dan Bapak Yohanes Jeffri sebagai bidang kordinator stunting.

“Mengatakan pihak pelaksana kebijakan dalam program stunting yang terlibat adalah kepala puskesmas serta tenaga medis di Puskesmas Lawir dalam menekan angka stunting di Kecamatan Lamba Leda Timur.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022).

2. Kepentingan Strategi Aktor yang Terlibat

Seberapa besar kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu evaluasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angelina Nurita warga Desa Tango Molas, Ibu Klemensiana Luneng warga Desa Tango Molas, Ibu Teresia Retno Wati warga Desa Tango Molas. Wawancara juga dilakukan kepada pihak Puskesmas Lawir yaitu kepada Bapak Kepala Puskesmas Lawir yaitu Fabianus Yan Supandi. Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada ketua gizi Ibu Elsi Mina Mingsi dan Bapak Yohanes Jeffri sebagai bidang kordinator stunting.

“Menurut pendapat mereka mengatakan bahwa mengenai kepentingan aktor yang terlibat yaitu melaksanakan pelatihan mengelola makanan lokal untuk menjadi makanan bergizi, pembentukan pos gizi di setiap desa, pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

berupa telur, susu kacang-kacangan, pemberian biskuit balita serta ibu hamil.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022).

3. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angelina Nurita warga Desa Tango Molas, Ibu Klemensiana Luneng warga Desa Tango Molas, Ibu Teresia Retno Wati warga Desa Tango Molas. Wawancara juga dilakukan kepada pihak Puskesmas Lawir yaitu kepada Bapak Kepala Puskesmas Lawir yaitu Fabianus Yan Supandi. Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada ketua gizi Ibu Elsi Mina Mingsi dan Bapak Yohanes Jeffri sebagai bidang kordinator stunting.

“Menurut pendapat mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pihak puskesmas dalam menjalankan program stunting jika terjadi kendala di lapangan yaitu komunikasi kepada sasaran dan juga melakukan pengadaan barang dan mengadakan kegiatan sosialisasi, lebih dijelaskan detail oleh Ibu Theresia Retnowati menjelaskan biasanya masyarakat sepengetahuan saya tidak terlalu minat mengikuti program sosialisasi dikarenakan kesibukan kerja dikebun.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2022).

4. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses

pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmanakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angelina Nurita warga Desa Tango Molas, Ibu Klemensiana Luneng warga Desa Tango Molas, Ibu Teresia Retno Wati warga Desa Tango Molas. Wawancara juga dilakukan kepada pihak Puskesmas Lawir yaitu kepada Bapak Kepala Puskesmas Lawir yaitu Fabianus Yan Supandi. Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada ketua gizi Ibu Elsi Mina Mingsi dan Bapak Yohanis Jeffri sebagai bidang kordinator stunting.

“Menurut pendapat mereka mengatakan bahwa ya konsisten karena keseriusan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menekan angka stunting patut di acungi jempol, dengan berbagai program yang telah di rancang dan terlaksana, Bupati Manggarai Timur optimistis tujuan menciptakan Manggarai Timur bebas stunting. Pihak yang terlibat menerima saran dan kritikan dari masyarakat terkait dengan program stunting? Ya bisa karena masukan dan kritikan dari mereka bisa berperan besar dalam pengembangan evaluasi kebijakan program stunting ke arah yang lebih baik.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2022).

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Grindle yaitu tentang konteks implementasi di Puskesmas Lawir dalam proses evaluasi kebijakan program stunting dapat dikatakan tidak ada kendala dikarenakan mengenai kepentingan aktor yang terlibat yaitu melaksanakan pelatihan mengelola makanan lokal untuk menjadi makanan bergizi, pembentukan pos gizi di setiap desa, pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berupa telur, susu, kacang-kacangan, pemberian biskuit balita serta ibu hamil.

Pemerintah sendiri konsisten karena keseriusan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menekan angka stunting patut di acungi jempol, dengan berbagai program yang telah di rancang dan terlaksana maka Bupati Manggarai Timur optimis untuk menciptakan Manggarai Timur bebas stunting. Namun, biasanya ada masyarakat tidak terlalu minat mengikuti program sosialisasi dikarenakan kesibukan kerja dikebun. Jika ada masukan dan kritikan bisa berperan besar dalam pengembangan evaluasi kebijakan program stunting ke arah yang lebih baik.

Hasil analisis di atas mengenai bagaimana perubahan yang dirasakan dari diterapkan kebijakan program stunting di Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur yaitu belum banyak perubahan yang signifikan dari adanya kebijakan program stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lawir.

Tabel 4.1. Data Jumlah Balita Stunting Tahun 2020 – 2022

No.	Tahun	Jumlah
1	2020	131
2	2021	185
3	2022	136

Sumber: Puskesmas Lawir

Berdasarkan hasil analisis program stunting dapat dikatakan belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penurunan angka stunting di Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur dapat dilihat dari tahun 2020 yaitu angka stunting sebesar 131 sedangkan pada tahun 2021 total angka stunting sebesar 183 angka menunjukkan ada penambahan sebesar 55 dan di tahun selanjutnya tahun 2022 sebesar 136 terjadi penurunan sebesar 47.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan di Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur terkait implementasi kebijakan program stunting menggunakan

teori dari Grindle maka peneliti memberikan kesimpulan analisis terkait dengan isi kebijakan yang dapat dikatakan bahwa program di Kecamatan Lamba Leda Timur belum berhasil secara optimal dikarenakan beberapa faktor-faktor.

Faktor tersebut diantaranya terlalu banyak mengkonsumsi makanan instan, dan kurangnya pendidikan orang tua sehingga berdampak kepada anak. Tapi dari program tersebut, puskesmas telah melakukan sosialisasi terkait stunting kepada orang tua sehingga memperoleh pengetahuan akan gizi anak, orang tua juga akan lebih memperhatikan pola makan anak, anak dapat perhatian lebih dari ortu juga ada tambahan gizi berupa makanan untuk anak yaitu PMT (Pemberian Makanan Tambahan).

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang melonjak tercatat sebanyak 136 kasus. Sedangkan berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Grindle, yaitu tentang konteks implementasi di Puskesmas Lawir dalam proses evaluasi kebijakan program stunting dapat dikatakan tidak ada kendala di karenakan mengenai kepentingan aktor yang terlibat yaitu melaksanakan pelatihan mengelola makanan lokal untuk menjadi makanan bergizi, pembentukan pos gizi di setiap desa, pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berupa telur, susu, kacang-kacangan, pemberian biskuit balita serta ibu hamil.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis peneliti memberikan saran terkait program stunting di Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten manggarai Timur yaitu, pihak puskesmas lebih sering mengadakan sosialisasi terkait program stunting di Puskesmas Lawir serta memberikan makanan tambahan bergizi dan masyarakat kurang minat mengikuti sosialisasi.

Pihak puskesmas membuat inovasi-inovasi program untuk menekan angka stunting seperti memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil dan terus memantau tumbuh

kembang anak di Kecamatan Lamba Leda Timur.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Arifin, K. M. R. Z. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Pencegahan Stunting di Wilayah Pamanukan (Studi Kasus Pada Puskesmas Pamanukan). *The World Of Public Administration Journal*, 1(2), 11–20.
- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Publika*, 1(2), 29–42.
- Akbar, P., Hamid, A., Bernard, M., & Sugandi, A. I. (2018). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dan Disposisi Matematik Siswa Kelas XI Sma Putra Juang Dalam Materi Peluang. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(1), 144–153.
- Clifton, P. M., & Neuman, S. P. (1982). Efek Kriging dan Pemodelan Terbalik Pada Simulasi Kondisional Akuifer Lembah Avra di Arizona Selatan. *Jurnal Penelitian Sumber Daya Air*, 18(4), 1215–1234.
- Ekananda, D. S., & Budi, I. S. (2021). Evaluasi Program Inovasi Penurunan Stunting Di Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau. *Disertasi*. Universitas Sriwijaya.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: jurnal ilmu Pemerintahan*, 2(1), 10–19.
- Indiahono, D. (2021). Reformasi Birokrasi dengan Membangun Kepercayaan pada Warga Negara: Praktik Terbaik dari Pengaduan Online Lokal. *Tinjauan Kebijakan dan Tata Kelola*, 5(2), 146–163.

- Lumongga, N., & Syahrial, E. (2013). Pengaruh Penyuluhan Dengan Metode Ceramah dan Diskusi Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Anak Tentang PHBS di Sekolah Dasar Negeri 065014 Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2013. *Jurnal Kebijakan, Promosi Kesehatan dan Biostatistika*, 2(1), 43–68.
- Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan perilaku kesehatan. Prayogi, R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Disertasi*. Universitas Islam Riau.
- Ramdhani, F. I. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Disertasi*. Universitas Negeri Makassar.
- Ulya, Z., Iskandar, A., & Triasih, F. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media Poster Terhadap Pengetahuan Manajemen Hipertensi Pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 12(1), 38–46.

